



Penurunan Stunting Mulai dari Kalurahan

PERCEPATAN penurunan stunting di DIY masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Sebagaimana kita ketahui, stunting merupakan masalah besar yang tidak boleh disepelekan. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2021, stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan balita berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ada dua cara dalam menangani stunting. Pertama, dimulai dari keluarga yakni fokus pada pengasuhan anak melalui pemantauan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Pada penanganan ini orangtua balita berperan penting dalam pemantauan balita dari lingkup keluarga. Pada fase emas, para orangtua dibantu oleh tenaga kesehatan yang disebut dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam pola asuhnya.

Tentu upaya-upaya perbaikan itu perlu melibatkan semua sektor dalam pelaksanaannya, pemerintah yang dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan OPD terkait komitmen bersama untuk mewujudkan misi besar itu secara berkelanjutan. Begitu juga dengan dukungan lembaga non pemerintah dalam bagi tugas menanganai masalah stunting ini.

Mulai dari Identifikasi

Berdasar faktor penyebab (determinan) stunting di masing-masing daerah perlu ada identifikasi penyebab untuk dapat dilakukan intervensi yang tepat dalam sebuah wilayah. Intervensi yang tepat bergantung dengan identifikasi masalah yang ditemui pada masing-masing daerah. Setiap Kabupaten/Kota di DIY melak-

Anif Muchlashin

sanakan Audit Kasus Stunting (AKS) yang dalam kegiatan ini didampingi oleh TIM Pakar yang terdiri dari dokter anak, dokter *obgyn*, ahli gizi profesional dan psikolog yang memberikan *advice* atau masukan dalam penanganan stunting di daerah.

Setelah bertemu dari hasil analisis dari para Tim Pakar kemudian setiap Kalurahan/Kelurahan dapat menindaklanjuti untuk dijadikan penentuan program. Kalurahan memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalurahan, selain itu Kalurahan juga memiliki Tim Pendamping Keluarga dan Kader Pembangunan Manusia yang mendampingi dalam rangka percepatan penurunan stunting dari hasil saran dari Tim Pakar melalui kegiatan Audit Kasus Stunting.

Melalui temuan ini nantinya stunting dipahami bukan hanya perkara lemahnya ekonomi, namun lebih pada membangun kesadaran dan pengetahuan dalam pencegahan stunting. Pendekatan yang tepat sesuai dengan kasus masing-masing, programnya menjadi unik bukan hasil gebyah uyah di semua daerah.

Perlunya Inovasi

Mendampingi keluarga berisiko stunting dengan sasaran Catin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Baduta dan Balita perlu pendekatan khusus dan tidak bisa disamakan dengan diberikan bantuan dipadankan dengan kemiskinan. Maka dari itu perlu adanya inovasi dari setiap daerah. Misal dari sebuah kalura-

han perlu ditekankan pada penanganan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis karena di daerah tersebut ditemukan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) tidak bisa disamakan dengan pola pemberian makanan tambahan kepada balita yang perlu makanan tambahan. Hal itu perlu pemberian pengetahuan kepada Ibu atau bahkan simbah yang mengasuh anaknya.

Melalui anggaran dana kalurahan perlu dibuat program dari hasil masalah tersebut. Sehingga nantinya program yang diberikan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata dimulai dari lingkup kecil : Kalurahan. Sehingga nantinya Jogja bebas stunting atau new zero stunting dapat diciptakan dengan pola penanganan lintas sektoral mulai dari Kalurahan. □-d

**) Anif Muchlashin MA, Tenaga Ahli Percepatan Penurunan Stunting-BKKBN DIY*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005